

**PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN AKUNTANSI KEUANGAN:
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN UMKM PROMOSI EKSPOR**

**PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI DAN AKUNTANSI KEUANGAN
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN UMKM
DAN PROMOSI EKSPOR**

Editor:

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2018

Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan
UMKM Promosi Ekspor/Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU (ed) —Ed. 1; Cet. 1.—
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xiv + 146 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-707-0

Judul:
Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan:
Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor,
Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU (ed.)

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1595.36.149.2018
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>
Yayasan Pustaka Obor (FB)
[pustakaobor_id \(IG\)](https://www.instagram.com/pustakaobor_id)

KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Buku dengan judul “Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor” memegang peranan sentral dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan serta pertumbuhan inklusif di tanah air. Pengembangan dan modernisasi UMKM berperan strategis karena keterlibatan masyarakat luas, bersifat informal, serta menyebar luas di tingkat perdesaan maupun perkotaan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Dalam buku ini secara khusus disasar UMKM dengan orientasi ekspor melalui penguatan paket kebijakan ekonomi, penerapan akuntansi keuangan, sinergi dan konsolidasi BUMN, serta difasilitasi dengan program kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE). Kesemuanya didedikasikan untuk mendorong ekspor produk UMKM dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa negara, dan penguatan nilai tukar rupiah.

Buku ini membahas empat aspek strategis dalam pengembangan UMKM berorientasi ekspor yaitu paket kebijakan ekonomi dan investasi UMKM bidang pertanian, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM), peran BUMN sebagai agregator-konsolidator, dan pemanfaatan fasilitas

KURBE dalam mendukung akses permodalan dan peningkatan daya saing ekspor produk UMKM. Keempat aspek penting dan strategis ini memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik dalam mendukung tema utama dari buku ini dengan sasaran utama pengembangan UMKM berorientasi ekspor. Keberhasilan pencapaian sasaran pengembangan UMKM akan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan di lapangan, pemahaman dan implementasi sistem akuntansi dan standar pelaporannya, pengembangan model kerja sama BUMN-UMKM yang sinergis dan saling menguntungkan, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas KURBE yang dirancang khusus untuk pengembangan ekspor produk UMKM.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya dan memberikan kontribusi pemikiran yang positif sehingga dapat dirumuskan perspektif kebijakan ke depan pengembangan UMKM berorientasi ekspor. Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian RI disampaikan terima kasih dalam upayanya membangun struktur dan perbaikan editorial naskah buku ini, sehingga layak untuk diterbitkan dan disimak pembaca. Kita semua berharap invensi dan inovasi kebijakan yang ditawarkan bermanfaat dalam pengembangan produk ekspor UMKM dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan berkualitas yang menjadi prioritas negara saat ini.

Jakarta, Agustus 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
<i>Dr. Indra Pahlevi</i>	
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Prolog	1
<i>Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU</i>	
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN INVESTASI UMKM: KINERJA KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF USAHA RINTISAN PERTANIAN	5
<i>Iwan Hermawan</i>	
I. Pendahuluan	7
II. Paket Kebijakan Ekonomi dan Investasi UMKM	11
II.1. Normatif vs Kritik	11
II.2. Investasi UMKM Bidang Pertanian	18
III. Pra dan Pasca Paket Kebijakan Ekonomi	23
III.1. Menelisik Realita Investasi UMKM Bidang Pertanian	23
III.2. Fenomena Usaha Rintisan Bidang Pertanian	29
III.3. Usaha Rintisan Pembiayaan Bidang Pertanian	33
IV. Penutup	38
Daftar Pustaka	40

**PRINSIP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN: STANDAR
PELAPORAN KEUANGAN MENDUKUNG AKSESIBILITAS
PERMODALAN UMKM** 45

Venti Eka Satya

I. Pendahuluan	47
II. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia	50
II.1. Definisi UMKM	50
II.2. Permasalahan yang Dihadapi UMKM	52
III. Prinsip Dasar dan Standar Akuntansi Keuangan	56
III.1. Prinsip Dasar Akuntansi	56
III.2. Standar Akuntansi Keuangan	60
IV. Standar Pelaporan Akuntansi Keuangan UMKM	65
IV.1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM	65
IV.2. Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	67
V. Penutup	71
Daftar Pustaka	73

**KEMITRAAN DAN SINERGI BUMN MENDUKUNG EKSPOR
UMKM: PERSPEKTIF KONSOLIDASI DAN RUMAH
KREATIF BUMN** 75

Rafika Sari

I. Pendahuluan	77
II. Kemitraan BUMN dan UMKM	80
II.1. Model Kemitraan	80
II.2. Dasar Regulasi Kemitraan BUMN dan UMKM	81
III. Kendala Ekspor Produk UMKM	85
III.1. Ketidakakuratan Basis Data Pelaku UMKM	86
III.2. Keterbatasan Kemampuan Finansial	87
III.3. Kendala Sarana dan Prasarana Ekspor	98
III.4. Rendahnya Pemahaman Standardisasi Ekspor	90
IV. Kebijakan Pemerintah melalui BUMN	93
IV.1. Agregator-Konsolidator Ekspor Produk BUMN	93
IV.2. Akses Digitalisasi Usaha melalui Rumah Kreatif BUMN	97

IV.3. Sinergi Lintas BUMN	102
V. Penutup	106
Daftar Pustaka	108
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT BERORIENTASI EKSPOR (KURBE): PERSPEKTIF PENINGKATAN DAYA SAING UMKM	111
<i>Eka Budiyaniti</i>	
I. Pendahuluan	113
II. Fasilitasi dan Kinerja UMKM Berorientasi Ekspor	116
II.1. Kinerja Ekspor UMKM	116
II.2. Perspektif Ekspor UMKM	118
III. Fasilitasi dan Realisasi Penyaluran KURBE	121
III.1. Kinerja Penyaluran KURBE	121
III.2. Perspektif Penyaluran KURBE	124
IV. Peran KURBE dalam Mendukung Daya Saing Ekspor UMKM	127
IV.1. Kinerja Peran KURBE	127
IV.2. Perspektif Peran KURBE	129
IV. Penutup	131
Daftar Pustaka	133
EPILOG	137
<i>Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU</i>	
INDEKS	140
TENTANG EDITOR	142
TENTANG PENULIS	144

DAFTAR TABEL

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN INVESTASI UMKM: KINERJA KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF USAHA RINTISAN PERTANIAN

Iwan Hermawan

BAB II PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN INVESTASI UMKM

Tabel 1.	Paket Kebijakan Ekonomi dan Isu Utama yang Menyertai serta Keterkaitannya dengan Investasi dan UMKM di Indonesia, Tahun 2015-2017	13
Tabel 2.	Perbandingan Proporsi Jumlah Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi, dan PDB dari UMKM per Bidang di Indonesia, Tahun 2009 dan 2013 (Persentase)	19

BAB III PRA DAN PASCA PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Tabel 3.	Beberapa Usaha Rintisan Bidang Pertanian di Dunia dan Indonesia	31
Tabel 4.	Beberapa Usaha Rintisan <i>Fintech</i> Bidang Pertanian di Indonesia	36

PRINSIP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN: STANDAR PELAPORAN KEUANGAN MENDUKUNG AKSESIBILITAS PERMODALAN UMKM

Venti Eka Satya

Tabel 1.	Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen	57
----------	--	----

Tabel 2.	Pilar Standar Pelaporan Akuntansi Keuangan di Indonesia	64
----------	---	----

KEMITRAAN DAN SINERGI BUMN Mendukung Ekspor UMKM: Perspektif Konsolidasi dan Rumah Kreatif BUMN

Rafika Sari

Bab IV Kebijakan Pemerintah Melalui BUMN

Tabel 1.	Rumah Kreatif BUMN di Indonesia, 2018	98
Tabel 2.	Nilai Ekspor UMKM RKB Mandiri di Surabaya	99
Tabel 3.	Kapasitas Pelayanan Rumah Kreatif BUMN di Indonesia, 2018	101

Program Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE): Perspektif Peningkatan Daya Saing UMKM

Eka Budiyaniti

Bab V Fasilitas dan Realisasi Penyaluran KURBE

Tabel 1.	Realisasi Nilai Penyaluran KURBE di Indonesia, 2016-2018	123
----------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN INVESTASI UMKM: KINERJA KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF USAHA RINTISAN PERTANIAN

Iwan Hermawan

BAB II PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN INVESTASI UMKM

- | | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Risiko dan Kesempatan Bisnis di Bidang Pertanian | 21 |
| Gambar 2. | Perkembangan PMDN di Indonesia, Tahun 2000-2017 (harga berlaku) | 25 |
| Gambar 3. | Perkembangan PMA di Indonesia, Tahun 2000-2017 (harga berlaku) | 26 |
| Gambar 4. | Perkembangan Investasi UMKM Bidang Pertanian di Indonesia, Tahun 2009-2017 (harga berlaku) | 27 |

PRINSIP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN: STANDAR PELAPORAN KEUANGAN Mendukung AKSESIBILITAS PERMODALAN UMKM

Venti Eka Satya

BAB III PRINSIP DASAR DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

- | | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Pilar Standar Akuntansi Keuangan Indonesia | 62 |
|-----------|--|----|

**BAB IV STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI
KEUANGAN UMKM**

Gambar 1. Asumsi Dasar SAK EMKM 66

**KEMITRAAN DAN SINERGI BUMN MENDUKUNG
EKSPOR UMKM: PERSPEKTIF KONSOLIDASI DAN
RUMAH KREATIF BUMN**

Rafika Sari

BAB II KEMITRAAN BUMN DAN UMKM

Gambar 1. Pola Program CSR yang Ditangani Langsung
oleh Perusahaan di Indonesia. 81

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI BUMN

Gambar 2. Skema Rantai Nilai Agregator-Konsolidator
Ekspor Produk UMKM di Indonesia. 95

PROLOG

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku dengan judul “Paket Kebijakan Ekonomi dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor” terdiri atas empat karya tulis ilmiah sebagai komponen pendukung, yaitu: (a) Paket kebijakan ekonomi (PKE) dan investasi UMKM: Kinerja kebijakan dan perspektif usaha rintisan pertanian; (b) Prinsip dasar akuntansi keuangan: Standar pelaporan keuangan mendukung aksesibilitas permodalan UMKM; (c) Kemitraan dan sinergi BUMN mendukung ekspor UMKM: Perspektif konsolidasi dan rumah kreatif BUMN; dan (d) Program kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE): Perspektif peningkatan daya saing UMKM. Keempat makalah pendukung diharapkan dapat mencapai sasaran utama dari buku ini yaitu pemantapan implementasi paket kebijakan ekonomi dan akuntansi keuangan yang dikomplemen dengan konsolidasi ekspor BUMN dan KURBE dalam mengakselerasi ekspor produk UMKM. Sasaran akhirnya adalah peningkatan akses permodalan dan daya saing ekspor UMKM dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan dan pertumbuhan berkualitas, peningkatan perolehan devisa dan pendapatan nasional.

Paket kebijakan ekonomi (PKE) dan investasi mendapatkan prioritas dan berperan penting dalam mengakselerasi peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM sektor pertanian mendapatkan prioritas karena kontribusinya yang nyata dalam pembangunan perdesaan dan nasional, terkait dengan

perannya dalam peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan dan kesejahteraan, pemerataan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. UMKM menghadapi kendala pengembangan usaha dan perluasan pasar dibandingkan dengan sektor formal swasta, karena permasalahan internal terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, ketersediaan dan akses permodalan, penciptaan dan pengembangan teknologi, daya saing produk dan pengembangan pasar. Di samping peningkatan produktivitas dan daya saing produk primer, tantangan UMKM sektor pertanian adalah pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi untuk pasar domestik dan ekspor. PKE diharapkan dapat memberikan insentif bagi perkembangan investasi UMKM melalui pengembangan kredit program (KUR, KURBE), kemudahan berusaha, dan kebijakan investasi lainnya.

Lemahnya pemahaman dan praktik standar akuntansi keuangan (SAK) berakibat pada lemahnya akses permodalan bagi UMKM ke lembaga perbankan formal, walaupun secara umum usaha kecil ini memiliki kelayakan finansial yang baik. Pada tahun 2014, dari 56,4 juta UMKM secara nasional hanya 30 persen atau sekitar 17 juta yang mendapat pembiayaan, di mana sekitar 24 persen masih tergantung pada sumber pendanaan non-bank. Jadi sekitar 70 persen UMKM belum mendapatkan akses sumber pembiayaan formal dari perbankan. Mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional maka Dewan SAK Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) meluncurkan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK ini dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana (berbeda dengan SAK-Umum) sehingga lebih mudah dan aplikatif bagi UMKM. Kehadiran SAK ini akan memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan, akses sumber pendanaan, dan lampiran pelaporan pajak.

Kontribusi ekspor non-migas UMKM relatif sangat kecil yaitu hanya 15,7 persen dibandingkan dengan eksistensi pelakunya yang

Prolog

sangat besar yaitu 57,9 juta pengusaha. Kontribusi ekspor produk UMKM ini dinilai paling rendah dibandingkan dengan negara ASEAN dan Asia lainnya. Kendala ekspansi ekspor yang dihadapi UMKM di antaranya adalah penguasaan teknologi, kualitas dan standar produk, konsistensi kemampuan dan ketersediaan produksi, perluasan diversifikasi dan pasar, serta persyaratan sertifikasi produk ekspor. Dalam mengatasi permasalahan ini diluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX terkait dengan penguatan sektor logistik, di antaranya melalui sinergi BUMN sebagai agregator dan konsolidator produk ekspor UMKM. Penguatan sektor logistik ini juga dikomplemen dengan efisiensi jasa pos komersial, e-pelayanan terpadu ke pelabuhan, dan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi transportasi. Keterlibatan BUMN dinilai strategis sebagai agregator dan konsolidator dalam sistem produksi dan ekspor UMKM melalui pemantapan dan penguatan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahan yang dihadapi UMKM bukan saja ketersediaan dan akses permodalan dalam peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga dalam pengembangan produk yang berdaya saing di pasar ekspor. Pemerintah telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan UMKM, tetapi khusus untuk UMKM dengan orientasi promosi ekspor diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). KURBE merupakan bagian dari PKE Jilid XI yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMKM berbasis ekspor. Perbedaan KURBE dibandingkan dengan skema kredit lainnya (khususnya KUR) di antaranya adalah penunjukan Bank Exim oleh LPEI dan adanya fasilitas perlindungan dari risiko kegagalan usaha, kegagalan bayar, dan risiko politik di negara tujuan ekspor. Pada akhirnya sasaran dari KURBE ini adalah sebagai stimulus bagi UMKM dalam peningkatan volume ekspor, daya saing produk, kualitas produk, dan nilai tambah produk ekspor.

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan terkait dengan implementasi paket kebijakan ekonomi dan investasi, pengenalan standar akuntansi keuangan, peran BUMN, dan pemanfaatan fasilitas KURBE dapat dirumuskan kebijakan pengembangan dan penguatan UMKM dalam peningkatan potensi dan kapasitas produksi serta promosi ekspor produk yang berdaya saing. Posisi dan peran UMKM sebagai sektor ekonomi strategis diharapkan akan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesempatan kerja dan berusaha, mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan berkualitas yang menjadi prioritas negara dan pemerintah.

Jakarta, Agustus 2018

EPILOG

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Tujuan umum dari penulisan buku ini adalah pementapan kebijakan ekonomi dan investasi serta pelaporan akuntansi keuangan dalam rangka penguatan akses permodalan, dikomplemen dengan konsolidasi BUMN dan fasilitas KURBE menuju daya saing ekspor produk UMKM. Buku mencakup empat aspek pokok bahasan yaitu paket kebijakan ekonomi, standar akuntansi dan pelaporan keuangan, peran BUMN, serta fasilitas KURBE.

Dalam bahasannya dengan topik “Paket kebijakan ekonomi dan investasi UMKM: Kinerja kebijakan dan perspektif usaha rintisan pertanian” Iwan Hermawan menyatakan bahwa potensi investasi UMKM bidang pertanian masih terbuka lebar untuk dikembangkan melalui penguatan sistem informasi dan teknologi serta *platform* usaha rintisan pertanian. PKE sebagai stimulus ekonomi diharapkan dapat meningkatkan akselerasi investasi UMKM bidang pertanian dan kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk pemerintah agar mampu mengevaluasi secara lebih komprehensif efektivitas PKE dan dampaknya terhadap investasi UMKM bidang pertanian. Dalam tataran implementasi, PKE membutuhkan sosialisasi intensif sehingga UMKM dan *stakeholder* terkait di daerah memiliki pemahaman yang sama dalam bergerak dan berkoordinasi. PKE agar lebih aplikatif juga memerlukan dukungan regulasi dan/atau petunjuk teknis sehingga dapat dioperasionalkan dengan lebih mudah oleh *stakeholder* terkait.

Venti Eka Satya dalam makalahnya yang berjudul “Prinsip dasar akuntansi keuangan: Standar pelaporan keuangan mendukung aksesibilitas permodalan UMKM” menyatakan bahwa UMKM umumnya memiliki kelayakan finansial usaha yang baik namun tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber pendanaan dari perbankan karena tidak memiliki laporan keuangan. Informasi akuntansi keuangan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk UMKM dan standar pelaporan keuangan dinilai penting untuk keseragaman bentuk dan pemahaman sehingga dapat diperbandingkan dengan lebih mudah bari berbagai entitas ekonomi yang berbeda. Dalam rangka mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang jauh lebih sederhana, dengan sasaran dapat membantu pelaku UMKM dengan lebih mudah dan lebih tepat dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam makalah berjudul “Kemitraan dan sinergi BUMN mendukung ekspor UMKM: Perspektif konsolidasi dan Rumah Kreatif BUMN”, Rafika Sari mengemukakan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menembus pasar ekspor dan kontribusi ekspornya dinilai relatif kecil. BUMN diprogramkan mengambil inisiatif dan peran melalui agregator-konsolidator ekspor, pengembangan Rumah Kreatif BUMN, dan sinergitas lintas BUMN untuk mendukung produk ekspor UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan dan kewajiban BUMN untuk melakukan pembinaan dan kemitraan dengan pelaku UMKM. Strategi penting yang patut dipertimbangkan dalam percepatan ekspor ini adalah membangun keterkaitan hulu-hilir antarsektor usaha dari UMKM dan BUMN, sejalan dengan regulasi BUMN, sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Instrumen strategis lainnya adalah memfasilitasi *business matching* pelaku UMKM lintas negara untuk mendapatkan informasi terkait dengan standarisasi produk dan perluasan diversifikasi pasar.

Epilog

Eka Budiyanti dalam makalahnya “Program kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE): Perspektif peningkatan daya saing UMKM” memberikan informasi menarik bahwa masalah permodalan, pengembangan SDM, dan pemenuhan standar perdagangan internasional merupakan masalah serius dalam peningkatan daya saing ekspor UMKM berbasis kerakyatan. Fasilitas KURBE diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diharapkan memantapkan sosialisasi fasilitas KURBE dan semakin mampu mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam penyaluran kredit program ini. Kendala yang dihadapi mencakup dimensi yang relatif luas yaitu kelemahan yang melekat pada karakteristik UMKM, tingkat suku bunga, penjaminan kredit, infrastruktur dan SDM, serta penetapan prioritas sektoral.

Diyakini bahwa melalui optimalisasi dan harmonisasi keempat aspek utama tersebut akan mampu meningkatkan potensi dan kapasitas UMKM. Kapasitas menyangkut aspek peningkatan produksi dan akses pasar ekspor, sehingga mampu berkontribusi positif dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Keberhasilannya membutuhkan dukungan regulasi dan kerja sama lintas sektor dalam memantapkan peran strategis UMKM berorientasi ekspor dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan inklusif.

Jakarta, Agustus 2018

INDEKS

A

agregator, 3, 15, 78, 79, 86, 93, 94,
95, 96, 97, 102, 106, 138
aksesibilitas, 1, 9, 22, 24, 45, 138
akuntansi manajemen, 56, 57

B

Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
82, 110

D

daya saing produk, 2, 3, 96, 115, 119,
121, 131

E

ekspor,
jaringan, 122
kinerja, 93, 99, 106, 116
konsolidator, 15, 78, 94, 95, 96,
102, 106, 138
kontribusi, 2, 3, 7, 77, 90, 106,
113, 118, 138
pasar, 3, 78, 90, 91, 92, 104, 106,
138, 139
pelaku, 91, 119
peluang, 92
pemasaran, 78
peningkatan, 78, 104, 132
penunjang, 104
produk, 3, 78, 79, 89, 90, 96,
104, 115, 121, 131, 138
promosi, 1, 3, 4, 78, 96
tujuan, 3, 91, 115, 117, 120

volume, 3, 89, 102, 115

entitas Mikro, Kecil, dan Menengah
(EMKM), 54, 61, 63, 65, 67

F

fasilitasi, 92, 104, 113, 130

I

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 49,
58, 61, 63, 65, 138
investasi UMKM, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 38, 137

K

kemitraan, 1, 75, 80, 81, 82, 83, 84,
101, 103, 104, 105, 106, 107,
122, 138
keuangan,
akuntansi, 1, 2, 4, 45, 47, 48, 49,
51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72,
137, 138
analisis, 145
informasi, 54, 56, 58, 59, 60
jasa, 35, 67
kondisi, 84, 106
laporan, 1, 45, 47, 48, 49, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 122, 125, 137, 138
lembaga, 8, 47, 48, 71, 88, 93,
115, 122, 126, 127, 129

Indeks

- manajemen, 52, 53, 57
pelaporan, 1, 45, 57, 60, 61, 63,
64, 65, 67, 72, 137, 138
pengembangan, 93
sektor, 146
sistem, 146
kinerja, 1, 5, 11, 67, 93, 96, 99, 106,
116, 121, 127, 128, 137
konsolidator, 3, 15, 78, 79, 83, 94, 95,
96, 102, 106, 138
Kredit Usaha Rakyat (KUR), 1, 3, 8,
16, 111, 114, 115, 139
KURBE, 1, 2, 3, 4, 16, 90, 111, 113,
114, 115, 122, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 137,
139
- L**
laba rugi, 54, 64, 68, 69
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI), 14, 115, 123,
139
- N**
neraca, 54
- P**
paket kebijakan ekonomi, 1, 3, 4, 7,
9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 28, 78, 79, 85, 86, 93, 94,
96, 106, 114, 121, 127, 128, 137
pelaku usaha, 12, 17, 32, 34, 47, 71,
82, 86, 87, 91, 92, 93, 97, 100,
101, 102, 106, 122, 126, 132
pemasaran, 24, 30, 31, 34, 50, 51, 53,
78, 80, 89, 91, 92, 95, 97, 100,
102, 103, 104, 119, 127, 129,
132
pembiayaan, 15, 16, 24, 33, 34, 35,
48, 65, 82, 93, 114, 121, 123,
126, 128, 129, 130, 132
pembinaan, 82, 83, 84, 100, 101,
106, 138
pendanaan, 2, 30, 28, 33, 47, 49, 52,
71, 88, 106, 138
perbankan, 2, 8, 13, 24, 28, 33, 38,
47, 48, 65, 71, 88, 98, 114, 115,
116, 125, 126, 130, 146
permodalan, 1, 2, 3, 45, 52, 53, 71,
114, 118, 131, 132, 137, 138,
139
promosi, 1, 3, 4, 78, 81, 91, 95, 96, 97
- R**
Rumah Kreatif BUMN, 1, 93, 97, 98,
99, 101, 106, 138
rintisan, 1, 7, 9, 17, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 128, 137
- S**
Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
2, 4, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63,
65, 72
SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas, 49,
61
Publik (SAK ETAP), 49, 63, 65
sinergi, 1, 3, 15, 35, 75, 78, 79, 81,
82, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 132,
138
- U**
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), 7, 27, 28, 49, 67, 77,
85, 86, 101, 106, 113
usaha rintisan, *lihat* rintisan

TENTANG EDITOR



Meraih gelar Ph.D *in Agricultural Economics* dari Universitas Filipina di Los Banos (UPLB) tahun 1995, I Wayan Rusastra (IWR) ditetapkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) pada tahun 2001. Sembilan tahun kemudian, pria kelahiran Denpasar, 31 Desember 1951 ini dikukuhkan sebagai Profesor Riset Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan orasi: Reorientasi Paradigma Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global.

Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) selama 37 tahun (1979-2016), IWR menghasilkan tidak kurang dari 150 karya tulis ilmiah (KTI). Selain itu IWR juga dikenal sebagai editor 35 buku/prosiding, Ketua Dewan Redaksi tiga jurnal ilmiah dan Anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 10 jurnal ilmiah lainnya. Suatu kehormatan baginya sebagai Editor tunggal 10 buku unggulan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dan Editor 13 buku/prosiding unggulan di PSEKP dengan lembaga mitra (nasional dan internasional). IWR yang pernah dipercaya sebagai Deputy Direktur R&D UNESCAP-CAPSA, Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3)-LIPI, dan Sekretaris Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional, turut aktif sebagai pembimbing dan promotor program doktor di IPB, UNPAD, dan UGM.

Biografi Editor

Priayang dikenal santun ini berhasil memperoleh tiga kali Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI dan dianugerahi penghargaan Ahli Peneliti Utama (APU) Berprestasi oleh Menteri Pertanian pada tahun 2002. Ia dapat dihubungi melalui email: wrusastra@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Iwan Hermawan, lahir di Malang tanggal 11 Juni 1978. Pendidikan S-1 dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian-Universitas Brawijaya diselesaikan pada tahun 2002. Selanjutnya, pendidikan S-2 Program Studi Ilmu Ekonomi-Institut Pertanian Bogor diselesaikan pada tahun 2008. Saat ini pendidikan S-3 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi-Universitas Indonesia sedang dirampungkan. Pekerjaan sebagai peneliti di bagian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dimulai sejak tahun 2009. Adapun kepakaran yang dikuasai adalah ekonomi terapan dengan kekhususan di bidang ekonomi makro, ekonomi pertanian, dan perdagangan internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang dihasilkan, antara lain *The Rice Import Determinant and Trade Liberalization in Jokowi Era* (dipresentasikan di 13th Indonesian Regional Science Association Conference) tahun 2016, Analisis Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN: Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global (dimuat pada *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015), dan Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014). Surat elektronik dapat dialamatkan ke: iwan.hermawan@dpr.go.id.

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Biografi Penulis

Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan di antaranya: Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Prospek Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Menuju Kedaulatan Sandang, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari supporting system Dewan, penulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi kedewanan. Penulis menjadi tim analisis keuangan negara yang menganalisis hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Century, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata, dan lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email: venti.eka@dpr.go.id.

Rafika Sari, menyelesaikan studi S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1999) dengan kepakaran ekonomi regional. Kemudian melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Bekerja sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 dengan kepakaran Kebijakan Publik. Tulisan yang sudah dipublikasikan bertopik antara lain desentralisasi fiskal, kerja sama regional Asia dan Eropa, pengelolaan aset dan penyertaan modal negara, pengembangan kawasan industri, pengembangan industri tekstil, dan revitalisasi BUMN Industri Strategis. Keterlibatan penulis dalam pelaksanaan fungsi kedewanan, antara lain menjadi tim asistensi dalam penyusunan RUU Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Badan Usaha Milik Negara (Revisi UU No. 19 Tahun 2003), RUU

Biografi Penulis

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Revisi UU No. 5 Tahun 1999), serta menjadi tim penyusunan Arah Kebijakan Umum dan Pengelolaan Anggaran) DPR RI. Penulis dapat dihubungi melalui email: rafika.sari@dpr.go.id.

Eka Budiyantri, lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menempuh studi S-1 pada jurusan Matematika-Fakultas MIPA, Universitas Padjajaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi -Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran Ekonomi Kebijakan. Beberapa topik jurnal dan buku yang telah ditulis antara lain adalah *time inconsistency* dalam kebijakan moneter, *inflation targeting*, subsidi pajak, pinjaman luar negeri, stabilitas sistem keuangan, krisis Eropa, sektor keuangan, *green banking*, *twin deficit*, bank khusus industri, industri manufaktur, dan investasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyantri@dpr.go.id.